



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VII DPR RI**  
**KE PLTU SURALAYA PT INDONESIA POWER DAN PT KRAKATAU STEEL**  
**(PERSERO) TBK.**  
**DI CILEGON PROVINSI BANTEN**

**MASA PERSIDANGAN III**  
**TAHUN SIDANG 2020-2021**

**KOMISI VII**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**  
**2021**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Suralaya Power Generation Unit (PGU) berlokasi di ujung barat Pulau Jawa, Provinsi Banten adalah salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimiliki oleh PT Indonesia Power (IP), yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero). Unit Pembangkitan Suralaya pertama kali dibangun pada tahun 1984 dengan 2 (dua) Unit Pembangkit dan terus ditingkatkan hingga menjadi 7 (tujuh) Unit Pembangkit dengan total kapasitas terpasang sebesar 3400 MW, menjadikan Suralaya PGU sebagai unit terbesar di Indonesia yang dimiliki PT Indonesia Power.

Selain itu, pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya unit 8 dengan kapasitas 1 x 625 MW, dikenal juga sebagai PLTU Banten 1 Suralaya *Operation and Maintenance Services Unit (OMU)*, terletak di sebelah timur PLTU Suralaya unit 1 - 7 eksisting.

Meskipun tergolong PLTU berbahan bakar batubara tertua di Indonesia (berumur sekitar 36 tahun), PLTU Suralaya merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia yang memproduksi sekitar 50% dari total produksi PT Indonesia Power dan berkontribusi sekitar 12% dari energi listrik kebutuhan Jawa - Bali. Dengan transmisi sebesar 500 kV, pembangkit tersebut mengonsumsi batubara kurang lebih 35.000 ton per hari.

Saat ini, kapasitas PLTU Suralaya sedang ditingkatkan dengan adanya proyek pembangunan PLTU Suralaya unit 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1000 MW. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran sebesar 3,5 miliar dolar AS atau setara 49 triliun rupiah dan akan menyerap sampai dengan 10000 orang tenaga kerja baik lokal maupun nasional. PLTU Suralaya unit 9 dan 10 diklaim akan lebih efisien dan ramah lingkungan karena menggunakan teknologi *Ultra Super Critical (USC)* yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca karena memiliki tingkat efisiensi konversi

energi sekitar 40%. Selain itu, konsumsi bahan bakar batubara juga semakin kecil, sekitar 320-340 gram per kWh saja.

Saat ini, PT PLN (Persero) juga tengah berupaya untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dalam transisi energi seperti yang diamanatkan dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan *co-firing* PLTU yang ada menggunakan biomassa, seperti yang akan dilakukan di PLTU Suralaya. *Co-firing* PLTU dengan bahan bakar biomassa adalah upaya alternatif mengurangi pemakaian batu bara dengan mengganti sebagian batubara dengan bahan bakar biomassa dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan. Khusus di PLTU Suralaya, *co-firing* akan dilakukan secara bertahap, mulai dari penggunaan 5% biomassa hingga rencana jangka panjang nantinya PLTU Suralaya diharapkan bisa secara penuh menggunakan biomassa. Secara keseluruhan terdapat 114 unit PLTU milik PLN yang berpotensi dapat dilakukan *co-firing* biomassa. Pembangkit tersebut tersebar di 52 lokasi dengan total kapasitas 18.154 megawatt (MW). *Co-firing* diharapkan dapat meningkatkan bauran EBT secara nasional.

Selain PLTU Suralaya, di Cilegon - Provinsi Banten juga terdapat PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang merupakan produsen baja terbesar di Indonesia. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. telah berkontribusi besar pada pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan swasta di berbagai wilayah. Saat ini, tren kebutuhan baja dalam negeri diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga mencapai 19 juta ton di tahun 2022 dan terus meningkat sebesar 23,34 juta ton di tahun 2025.

Melanjutkan proses transformasi dan inisiatif restrukturisasi menjadi fokus PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. pihak perusahaan terus mendorong program hilirisasi produk baja sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. dan juga dalam rangka mengoptimalkan utilisasi industri baja dalam negeri. Saat ini, dari kapasitas produksi baja dalam negeri yang mencapai 4,9 juta ton per

tahun, utilisasinya belum 100% karena industri yang ada di Indonesia didominasi oleh baja impor. Salah satu strategi target hilirisasi produk yang tengah dijajaki oleh PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. adalah rencana kerja sama untuk mensuplai bahan baku baja untuk industri otomotif mobil listrik yang akan berinvestasi di Indonesia.

Untuk mendukung kinerjanya, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. telah menandatangani kerja sama perjanjian jual beli gas seharga US\$ 6 per MMBTU dengan PT PGN Tbk. Berdasarkan perjanjian itu, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. menyerap gas bumi dari PT PGN, Tbk. sebesar 10-15 billion BBTUD untuk Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Banten. Dengan adanya kesepakatan ini, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. dapat menurunkan biaya energi, khususnya gas alam yang digunakan dalam proses produksi baja sehingga harga produk baja nasional semakin kompetitif di pasar. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden No. 40/2016, Permen ESDM No. 8/2020, dan Kepmen ESDM No. 89 K/10/MEM/2020.

PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. mendapatkan alokasi gas melalui PT PGN, Tbk. dengan volume minimum 10 MMSCFD atau 300 ribu MMBTU per bulan dan maksimum 15 MMSCFD (450 ribu MMBTU per bulan) dengan jangka waktu perjanjian hingga tahun 2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur nasional, khususnya industri baja karena sektor manufaktur merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI yang membidangi energi serta kegiatan riset dan teknologi, memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Banten pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021, dengan objek kunjungan kerja ke PLTU Suralaya PT Indonesia Power dan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja Komisi VII DPR RI, khususnya PT PLN (Persero) melalui anak perusahaan PT Indonesia Power serta PT PGN Tbk.

sebagai pemasok gas ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan solusi khususnya di sektor ketenagalistrikan dan industri manufaktur, serta membawa informasi dan data terkait bidang - bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 11 Januari 2021 tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 - 2021.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA**

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya PT Indonesia Power dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. di Provinsi Banten adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam penyediaan informasi di sektor ketenagalistrikan, keandalan pasokan energi, dan industri manufaktur. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data, informasi, dan melihat secara langsung pelaksanaan kinerja PT PLN (Persero) melalui anak perusahaan PT Indonesia Power, serta mengetahui kinerja PT PGN, Tbk. dalam mensuplai gas ke PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi oleh PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT PGN Tbk., dan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.
3. Mengetahu isu-isu strategis di sektor ketenagalistrikan, energi, dan industri manufaktur di Provinsi Banten.

4. Mengetahui kinerja yang dilaksanakan mitra komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sektor energi dan sumber daya mineral.

#### **D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN, DAN AGENDA KEGIATAN**

Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 11 - 15 Februari 2021 dengan tujuan kunjungan ke PLTU Suralaya PT Indonesia Power dan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. di Provinsi Banten. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja Reses adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Direksi PT PLN (Persero), Dirut PT Indonesia Power, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, dan Pemkot Cilegon terkait dengan kondisi PLTU Suralaya, kontribusi PLTU Suralaya terhadap sektor ketenagalistrikan di Provinsi Banten maupun Jawa - Bali, serta rencana substitusi batubara dengan pembangkit EBT di PLTU Suralaya.
2. Peninjauan lapangan ke PLTU Suralaya.
3. Pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirut PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., Direksi PT PGN, Tbk., Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, dan Pemkot Cilegon terkait dengan kinerja PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., pasokan gas PT PGN, Tbk. untuk PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., serta dukungan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia.
4. Peninjauan lapangan ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

#### **E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya PT Indonesia Power dan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. di Provinsi Banten adalah memperoleh informasi yang terkait dengan kondisi sektor ketenagalistrikan, keandalan pasokan energi, dan manufaktur yang ada di Provinsi Banten.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

#### **F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan; yaitu menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan; yaitu dilakukan pertemuan dengan instansi terkait dan melihat objek kunjungan secara langsung.
3. Pelaporan; berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

#### **G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN**

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir. Selain itu juga didampingi oleh mitra Komisi VII DPR RI.

<b>DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI PLTU SURALAYA PT INDONESIA POWER DAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. DI CILEGON PROVINSI BANTEN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021 TANGGAL 11-15 FEBRUARI 2021</b>				
NO.	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	JABATAN
1	RAMSON SIAGIAN	A-104	P. GERINDRA	KETUA TIM

2	Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA	A-184	PDI PERJUANGAN	WAKIL KETUA TIM
3	DONY MARYADI OEKON	A-256	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4	H. ANDI RIDWAN WITTIRI	A-250	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5	RIBKA TJIPTANING PLORETAIYATI	A-167	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU	A-168	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7	H. HASNURYADI SULAIMAN, S.E., M.A.B.	A-336	P. GOLKAR	ANGGOTA
8	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.	A-335	P. GOLKAR	ANGGOTA
9	KATHERINE A. OENDOEN	A-123	P. GERINDRA	ANGGOTA
10	Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M.	A-391	P. NASDEM	ANGGOTA
11	RICO SIA	A-408	P. NASDEM	ANGGOTA
12	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E. M.M.	A-524	PKB	ANGGOTA
13	MUHAMMAD NASIR	A-530	P. DEMOKRAT	ANGGOTA
14	Dr. H. MULYANTO, M.Eng.	A-450	PKS	ANGGOTA
15.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	A-492	PAN	ANGGOTA
16.	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.	A-517	PAN	ANGGOTA



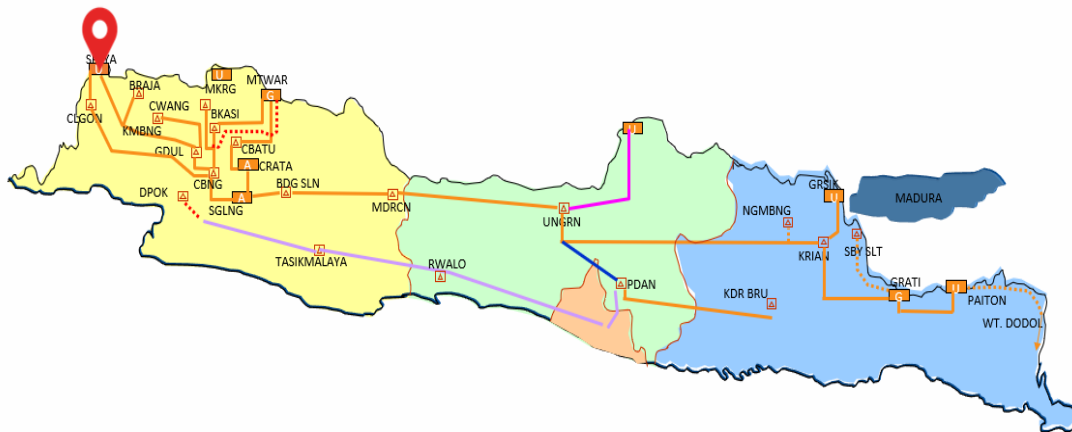
## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN

#### A. KUNJUNGAN KE PLTU SURALAYA

PT Indonesia Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang memegang peranan strategis dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kegiatan utama bisnis perusahaan PT Indonesia Power saat ini yakni sebagai penyedia solusi energi yang meliputi penyediaan tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta pengembangan bisnis beyond KWh.

PT Indonesia Power memiliki 4 (empat) unit Power Generation Unit (PGU), yaitu: Suralaya PGU, Semarang PGU, Mrica PGU, dan Bali PGU; 9 (sembilan) unit Operation & Maintenance Service Unit (OMU), yaitu: Banten 1 Suralaya OMU, Banten 3 Lontar OMU, Adipala OMU, Cilegon OMU, Jeranjang OMU, Banten 2 Labuan OMU, Palabuhan Ratu OMU, Pangkalan Susu OMU, Barru OMU; Power Generation and Operation & Maintenance Service Unit (POMU), yaitu: Priok POMU, Grati POMU, Kamojang POMU, Saguling POMU, Holtekamp POMU; dan satu Maintenance Service Unit.



Gambar 1. Jaringan Listrik Sistem Jawa-Madura-Bali yang Dipasok dari PLTU Suralaya

Unit Pembangkitan Suralaya (PLTU Suralaya) yang merupakan objek Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara

terbesar di Asia Tenggara, dan memberikan kontribusi sebesar 12% untuk pasokan jaringan listrik Jawa – Madura - Bali. PLTU Suralaya pertama kali beroperasi pada tahun 1984. Saat ini, total kapasitas terpasang PLTU Suralaya sebesar 3400 MW. Kontribusi PLTU Suralaya terhadap kelistrikan Jakarta dan Banten cukup dominan sebesar 31 % dengan daya PLTU Suralaya 3.211 sebesar MW dan beban Puncak Jakarta banten 10.359 MW.

Total konsumsi bahan bakar PLTU Suralaya mencapai 33.000 ton/hari yang dipasok dari beberapa perusahaan, yaitu: PT Adaro Indonesia, PT Artha Daya Coalindo (anak perusahaan PT Indonesia Power), PT Berau Coal, PT Bukit Asam, PT Oktasan Baruna Persada, dan PT PLN Batubara. PT Bukit Asam pada awalnya merupakan pemasok tunggal batubara ke PLTU Suralaya, tetapi karena kebutuhan akan energi primer batubara untuk listrik terus meningkat, maka perusahaan terus mencari pemasok untuk mencukupi kebutuhan perusahaan, hingga saat ini ada 6 pemasok.



Gambar 2. Kunjungan Lapangan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya

PLTU Suralaya telah menggunakan beberapa strategi dalam menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) energi listrik, salah satunya

dengan melakukan *coal switching* dari batubara dengan kalori 5.000 kcal/kg menjadi 4.600 kcal/kg, sehingga BPP bisa lebih murah bahkan apabila dibandingkan dengan IPP modern sekalipun.

Selain itu, mengingat PLTU Suralaya merupakan PLTU yang sudah berumur lebih dari 36 tahun, maka pihak perusahaan juga berencana melakukan modifikasi beberapa peralatan di pabrik menjadi *flexible coal power plant* pada tahun 2022-2023 dengan mengkombinasikan penggunaan panel surya untuk pembangkitan listriknya. Sementara itu, untuk rencana jangka panjangnya, perusahaan telah bekerjasama dengan konsultan asal Jerman untuk memodifikasi PLTU Suralaya sebagai *Combined Cycle Power Plan (CCPP)* dengan *Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)* atau LNG pada tahun 2032.

Dalam rangka mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dalam transisi energi seperti yang diamanatkan dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, PLTU Suralaya juga telah mulai melakukan program *co-firing* biomassa dengan bahan baku sekam padi dan serbuk gergaji. Ujicoba tersebut sudah dimulai sejak bulan November tahun 2020 dengan komposisi 5% sekam padi untuk bulan November 2020 dan 5% serbuk gergaji untuk bulan Desember 2020. Keuntungan dari pemanfaatan biomassa tersebut adalah lebih ramah lingkungan dan juga menekan BPP. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI berharap supaya implementasi program *co-firing* tersebut terus menerus ditingkatkan demi terciptanya energi bersih di PLTU Suralaya. PLTU Suralaya juga telah memanfaatkan *outfall* pabrik sebagai penggerak kincir air untuk lampu penerangan.

Kontribusi PLTU Suralaya terhadap lingkungan termasuk baik, terbukti dengan diperolehnya penghargaan Proper Hijau. Beberapa program bina lingkungan sudah diterapkan kepada masyarakat setempat dengan berbagai pelatihan dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah *fly ash-bottom ash (FABA)* yang dihasilkan PLTU Suralaya mencapai 1.183 ton/hari untuk *fly ash* dan 295 ton/hari untuk *bottom ash*.

Limbah tersebut diolah menjadi komponen utama dalam pembuatan paving block.

Dengan lokasi yang sangat strategis, infrastruktur transmisi listrik yang memadai, dan adanya berbagai industri besar di Cilegon, Komisi VII DPR RI mendukung agar Propinsi Banten untuk berkembang menjadi tujuan investasi untuk pengembangan industri berat. Tetapi, hal yang harus diperhatikan adalah harus ada jaminan ketersediaan energi primer sebagai sumber pembangkit listrik untuk industri-industri yang ada, termasuk juga untuk masyarakat di sekitar Cilegon dan Provinsi Banten.



Gambar 3. Tim Kunjungan Kerja DPR RI bersama Para Mitra Ketika Mengunjungi PLTU Suralaya

Isu yang saat ini muncul adalah stok batubara sebagai sumber energi primer yang mulai menipis. Informasi yang diperoleh pada saat kunjungan yaitu cadangan batubara di PLTU Suralaya tinggal tersisa 5 hari lagi. Hal tersebut terjadi karena beberapa pemasok batubara tidak menepati komitmen mereka sesuai perjanjian kontrak. Para pemasok lebih memilih mengekspor batubara karena harga jual yang lebih tinggi daripada harga jual di dalam negeri sehingga lebih menguntungkan perusahaan mereka. Untuk

mengatasi hal tersebut, pihak PLTU Suralaya terpaksa menggunakan BBM pada awal mesin dijalankan mulai tanggal 25 Januari 2021. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian yang sangat besar dari Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM perlu mendukung dengan kebijakan-kebijakan agar ketersediaan energi primer batubara tetap terjangkau agar pasokan energi listrik secara khusus dari PLTU Suralaya dan secara umum dari PLTU-PLTU yang dikelola oleh PT PLN (Persero) di pulau Jawa dapat dengan lancar menghasilkan listrik ke sistem jaringan transmisi Jawa – Madura - Bali. Melihat fenomena tersebut, Komisi VII DPR RI berencana mengagendakan rapat dengan Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan para pemasok batubara untuk mempertegas komitmen mereka dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri melalui *Domestic Market Obligation* (DMO) sesuai kontraknya. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta supaya Pemerintah tetap komitmen mengawal kebijakan DMO untuk mendukung ketahanan energi nasional.

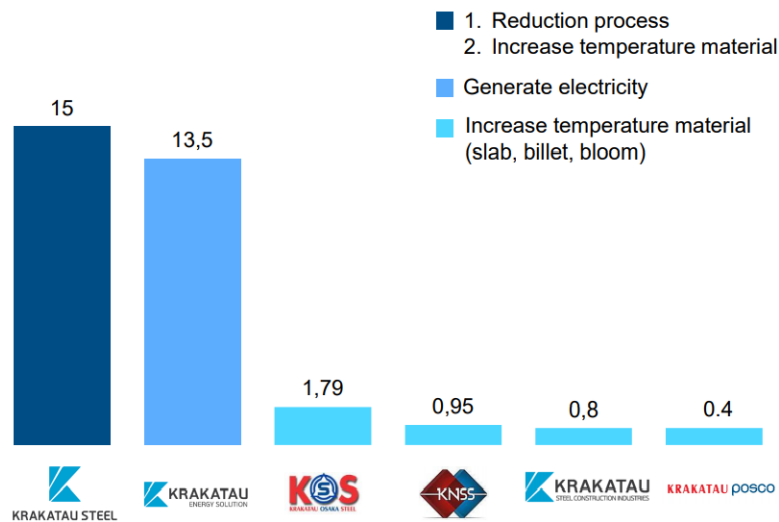
Menutup kegiatan kunjungan kerja di PLTU Suralaya, Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan perpanjangan pemberian stimulus bagi para pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi selama masa pandemi Covid-19, atau pemberian mekanisme stimulus yang lain untuk meringankan beban masyarakat.

## **B. KUNJUNGAN KE PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK.**

PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. merupakan produsen baja terbesar di Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi sektor manufaktur di Indonesia, khususnya dalam mendukung sektor industri karena 80% produk PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. merupakan bahan baku untuk proses industri yang lain. Akan tetapi, saat ini salah satu kendala yang dihadapi oleh industri baja dalam negeri adalah maraknya produk baja impor dengan harga yang lebih murah, sehingga menurunkan *utilisasi*

industri baja dalam negeri. Hal itu tentu saja akan mengancam keberlangsungan industri baja nasional, khususnya di era pandemi ini dimana ada kecenderungan penurunan permintaan baja dalam negeri. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu adanya penguatan regulasi *safeguard* dan *anti-dumping*. Dengan adanya penguatan regulasi tersebut, maka akan menciptakan iklim yang baik bagi industri baja nasional dan meningkatkan daya saing produk baja nasional.

Melalui Kepmen No. 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, Pemerintah juga telah membuat kebijakan dengan menetapkan harga gas bumi di *plant gate* sebesar US\$ 6 per MMBTU untuk 7 (tujuh) golongan industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.



Gambar 4. Profil Konsumsi Gas Krakatau Steel & Groups

Khusus untuk Krakatau Steel & Groups, beberapa perusahaan di dalamnya memanfaatkan gas bumi untuk berbagai keperluan. Gas bumi tersebut dipasok oleh PT PGN, Tbk. dan Pertamina EP, dengan sebagian besar gas dipasok oleh PT PGN, Tbk. Untuk PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. gas bumi digunakan dalam proses produksi baik untuk reduksi maupun meningkatkan temperatur material; sedangkan untuk PT Krakatau Daya Listrik, gas bumi digunakan sebagai energi primer pembangkit listrik. Dua



perusahaan tersebut merupakan dua perusahaan dengan jumlah porsi konsumsi gas bumi terbesar, yaitu 15 BBTUD untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan 13,5 BBTUD untuk PT Krakatau Daya Listrik.

Pada bulan Juni Tahun 2020, PT Krakatau Steel (Persero). Tbk. telah menandatangani kerja sama perjanjian jual beli gas seharga US\$ 6 per MMBTU dengan PT PGN, Tbk. dengan volume sebesar 15 BBTUD. Dengan ditandatanganinya perusahaan tersebut, tentu saja diharapkan biaya produksi PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. lebih efisien sehingga meningkatkan daya saing produk baja yang dihasilkan.



Gambar 5. Diskusi Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan Para Mitra Kerja di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Akan tetapi, harga kontrak gas bumi untuk PT Krakatau Daya Listrik saat ini sebesar US\$ 8,55 per MMBTU. Padahal PT Krakatau Daya Listrik mempunyai peran yang sangat vital dalam mencukupi kebutuhan energi tidak hanya di PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., tetapi juga untuk 60 industri lain yang ada di sekitarnya. Hal tersebut tentu saja membuat harga produk-produk industri yang mengandalkan pasokan listrik dari PT Krakatau Daya Listrik menjadi tidak kompetitif. PT Krakatau Daya Listrik sudah mengirimkan surat ke Kementerian ESDM RI agar harga gas bumi untuk konsumsi listrik di PT Krakatau Daya Listrik ditetapkan sebesar US\$ 6 per

MMBTU. Penurunan harga gas bumi untuk PT Krakatau Daya Listrik menjadi US\$ 6 per MMBTU diproyeksikan akan menurunkan biaya pemakaian listrik konsumen sebesar Rp 250/kWh atau terdapat potensi penghematan sebesar 1,1 triliun.



Gambar 6. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyadari pentingnya keberpihakan harga gas yang murah untuk industri dalam negeri termasuk untuk industri baja dan pembangkit listrik. Hal tersebut merupakan bagian dari efisiensi biaya produksi. Efisiensi tersebut akan membuat produk industri yang dihasilkan lebih kompetitif sehingga bisa bersaing dengan produk impor yang saat ini harganya lebih murah. Tentu saja setelah itu akan terjadi multiplier efek, misalnya dengan peningkatan kapasitas produksi, menyerap banyak tenaga kerja, hingga akhirnya memperbaiki neraca dagang. Saat ini, produk baja menduduki peringkat ketiga untuk produk impor dalam neraca perdagangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi VII DPR RI akan melakukan pendalaman terkait implementasi harga gas bumi untuk industri dan pembangkit listrik dengan mengundang Ditjen Migas Kementerian



ESDM RI, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., PT Krakatau Daya Listrik, PT PGN, Tbk. maupun perusahaan pemasok gas yang lain. Hal tersebut tentu saja merujuk pada Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi serta peraturan-peraturan turunannya.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI memandang bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara pasokan, serapan, dan pendistribusian gas bumi padahal produksi gas dalam negeri sangat melimpah. Oleh karena itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM RI untuk membuat kebijakan penyerapan gas dalam negeri dengan harga yang terjangkau berikut infrastrukturnya yang memadai.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengapresiasi adanya PLTU Suralaya yang telah berkontribusi besar dalam menjamin kehandalan pasokan listrik di sistem Jawa – Madura - Bali pada umumnya, dan Provinsi Banten pada khususnya.
2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengapresiasi ujicoba implementasi program *co-firing* yang telah dilakukan di PLTU Suralaya dan berharap agar program *co-firing* terus menerus ditingkatkan persentasenya secara kontinyu.
3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan agar ketersediaan energi primer batubara tetap terjangkau sehingga pasokan energi listrik secara khusus dari PLTU Suralaya dan secara umum dari PLTU-PLTU yang dikelola oleh PT PLN (Persero) di pulau Jawa dapat dengan lancar menghasilkan listrik ke sistem jaringan transmisi Jawa – Madura - Bali.
4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan rapat dengan Kementerian ESDM RI, PT PLN (Persero), dan para perusahaan pemasok batubara dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan batubara sebagai energi primer untuk sektor pembangkit listrik.
5. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendukung penguatan industri baja nasional agar dapat bersaing dengan baja impor.
6. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM RI untuk mengevaluasi kebijakan penetapan harga gas untuk industri dan pembangkit listrik dengan berpedoman pada Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
7. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan rapat dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM RI, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., PT Krakatau

Daya Listrik, PT PGN, Tbk. dan instansi terkait lainnya dalam rangka implementasi harga gas bumi untuk industri dan pembangkit listrik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten; dengan harapan dapat memperkaya pemikiran, masukan, dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusionalnya.

Jakarta, 15 Februari 2021

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

**RAMSON SIAGIAN**